

Maudemarie Clark,
Nietzsche on Ethics and Politics,
New York: Oxford University Press, 2015,
x+318 hlm.



Maudemarie Clark adalah salah satu dari sekian akademisi yang cukup tekun menggeluti teks-teks Nietzsche dalam 20 tahun terakhir ini. Buku pertamanya berjudul *Nietzsche on Truth and Philosophy* juga diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1990. Sejak saat itu, Clark sering menuliskan kajian-kajiannya mengenai Nietzsche pada berbagai antologi buku maupun jurnal, termasuk *Journal of Nietzsche Studies* (New York: Penn State University Press).

Salah satu kekhasan pendekatan Clark adalah pendekatan kombinasinya yang bercorak analitis. Ia menamakannya kombinasi karena ia mengambil unsur-unsur pendekatan tradisional (Walter Kaufmann dan John Wilcox) dan pendekatan Nietzsche Baru (Alexander Nehamas dan Sarah Kofmann) seraya menganalisisnya dengan gaya analitis (seperti Arthur Danto dan Bern Magnus). Dan hasilnya adalah suatu kajian simpatik mengenai filsafat Nietzsche yang berkaitan erat dengan perkembangan sains, pendidikan, etika, dan politik terkini.

Dua tema terakhir itulah (etika dan politik) yang menjadi tema besar buku terbarunya, *Nietzsche on Ethics and Politics* (NEP). Tentu saja kajian Clark ini menarik karena bertentangan dengan pandangan umum yang sering dikenakan kepada Nietzsche: imoralis dan apolitis. NEP sendiri sebetulnya terdiri dari empat belas artikel yang telah disusun secara terpisah oleh Clark entah sebagai artikel jurnal, konferensi, ataupun kuliah. Namun, untuk memudahkan pembaca, Clark menggolongkan keempat belas artikel tersebut ke dalam tiga topik besar, yakni etika, politik, dan metafisika.

Untuk memahami etika Nietzsche, Clark mengajak pembaca untuk terlebih dahulu menafsirkan istilah kunci yang dilontarkan oleh Nietzsche sendiri, yaitu imoralisme. Clark berpendapat bahwa Nietzsche menjadi

seorang imoralis untuk mengatasi persoalan nilai yang selalu identik dengan persoalan moral (hlm. 25). Padahal, dalam analisis Clark, skema baik dan buruk (moral) hanyalah salah satu penilaian. Clark mendasarkan analisisnya berdasarkan aforisme *Beyond Good and Evil* (BGE) §32.

Lebih lanjut, Clark berani menyatakan bahwa *Genealogy of Morals* (GM) merupakan analisis orisinal Nietzsche yang utuh mengenai teori moralitas (hlm. 28). Pernyataan Clark tersebut cukup berani mengingat GM terdiri atas tiga esai terpisah. Bahkan, Clark juga menyadari bahwa tidak ada pernyataan eksplisit dari Nietzsche sendiri untuk menghubungkan tiga esai tersebut sebagai satu kesatuan. Meski demikian, Clark berpendapat corak fragmentaris di dalam GM tidak berarti mengisahkan narasi-narasi moral yang berbeda ataupun multiperspektif. Sebaliknya, Clark memandang GM sebagai upaya sadar Nietzsche untuk menganalisis moral dalam kerumitan sejarahnya serta keterjalannya dengan unsur-unsur lain yang tidak disadari (hlm. 31).

Berdasarkan asumsi itulah, Clark menyatakan bahwa Nietzsche berupaya melampaui moralitas yang sarat dengan ideal-ideal asketis sebagaimana diperlihatkan di dalam sejarah peradaban Barat (hlm. 40). Dan menurut Clark, salah satu upaya pelampauan itu dieksplisitkan dengan baik oleh Bernard Williams melalui pembedaan antara etika dan moralitas. Bagi Clark, mengutip Williams, etika adalah segala jenis skema yang mengatur hubungan antarmanusia yang beroperasi melalui sanksi-sanksi informal dan internalisasi berbagai disposisi (hlm. 42). Sebaliknya, moralitas adalah sebuah orientasi etis tertentu yang “begitu lekat dengan kita” sehingga filsafat moral menghabiskan waktunya untuk mendiskusikan perbedaan-perbedaan internalnya ketimbang membandingkannya dengan orientasi-orientasi etis lainnya.

Tepat pada pokok itulah Clark menegaskan kritik Nietzsche terhadap moralitas. Clark menyatakan, “Persis itulah posisi Nietzsche. Ia berpikir bahwa apa yang kita sebut ‘moralitas’ [...] adalah ‘yang begitu lekat dengan kita’ karena moralitas menghadirkan dirinya sebagai satu-satunya bentuk kehidupan etis yang mungkin (hlm. 40).” Dalam arti

itulah, Clark menegaskan bahwa Nietzsche menjadi seorang imoralis untuk menolak pengertian moralitas dalam arti sempit, tetapi bukan untuk menolak sama sekali sistem-sistem etika.

Berkaitan dengan tema politik, Clark menawarkan sebuah pembacaan bahwa Nietzsche bukanlah seorang yang anti terhadap demokrasi. Malahan, Clark mempertahankan sebuah tesis yang lebih positif bahwa Nietzsche mendukung demokrasi, khususnya melalui komitmen Nietzsche terhadap sains yang tumbuh dalam iklim demokrasi (hlm. 164). Namun, sebelum melangkah lebih jauh, Clark mengajak pembaca untuk menafsirkan kembali sikap politik Nietzsche yang bersifat "aristokratis."

Clark melandaskan analisisnya mengenai sikap politik Nietzsche berdasarkan BGE, khususnya aforisme §203, §211, §257-8, dan §251. Dalam pandangan umum, Nietzsche menyatakan bahwa ideal-ideal demokrasi liberal justru menghancurkan tatanan politik dan kemanusiaan. Karena itu, Nietzsche mengharapkan suatu tata-tatanan aristokratis yang baru yang akan meningkatkan tipe manusia. Melalui tatanan aristokratis tersebut, masyarakat mengakui perbedaan-perbedaan tingkatan di dalam tatanannya. Dan perbedaan-perbedaan nilai atau tingkatan tersebut ditentukan oleh sang filsuf sejati yang berperan sebagai "pemimpin dan legislator" (BGE §211). Singkatnya, Nietzsche menolak gagasan "modern" mengenai kesetaraan (BGE §257) dan mengusung tatanan aristokratis.

Bagi Clark, salah satu kelemahan pembacaan umum tersebut adalah, "Apakah Nietzsche meyakini bahwa peningkatan tipe manusia bergantung pada sistem politik aristokratis (hlm. 170)?" Selain itu, Clark juga mempertanyakan apakah para filsuf juga akan menerapkan unsur paksaan dan kekerasan demi melegislasi atau menata nilai-nilai yang diciptakannya? Berbeda dengan pandangan umum tersebut, Clark mengajukan pendapat bahwa penyempurnaan tipe manusia tidak bergantung pada insitusi politik aristokratis kendati selalu beroperasi dalam masyarakat aristokratis. Dengan kata lain, Clark menggarisbawahi

perbedaan antara orientasi nilai-nilai aristokratis dan institusi politik aristokratis (hlm. 171).

Menurut Clark, Nietzsche meyakini bahwa tujuan atau nilai tertinggi keberadaan masyarakat justru terletak pada dimungkinkannya tipe manusia yang lebih tinggi. Oleh karena itu, suatu aristokrasi diperlukan untuk menghasilkan tipe manusia unggul tersebut (hlm. 173). Bagi Clark, Nietzsche tidak memiliki keberatan apapun terhadap institusi-institusi politik demokrasi selama cocok dengan nilai-nilai aristokratis. Dalam tafsir Clark, nilai-nilai aristokratis ini sejajar dengan segelintir orang (kaum filsuf) yang mampu mengarahkan atau memandu tujuan hidup manusia dibandingkan apa yang dapat dipikirkan oleh kebanyakan orang (hlm. 174).

Meski demikian, Clark juga mengakui bahwa aristokrasi yang ditawarkan oleh Nietzsche memang dapat memberi kesan menindas (otoriter). Apalagi, Nietzsche menggunakan istilah “kasta penguasa” dalam BGE §257 secara harfiah—bukan dalam pengertian metaforis. Namun, Clark menawarkan pembacaan yang lebih hati-hati sehingga membedakan deskripsi antara aristokrasi historis-aktual dan masyarakat aristokratis ideal. Tentu saja, aristokrasi yang dimaksud oleh Nietzsche dalam tafsir Clark adalah deskripsi masyarakat aristokratis ideal yang memungkinkan tipe manusia yang lebih tinggi (hlm. 175).

Selain membahas tentang nilai-nilai aristokrasi dalam institusi politik demokratis, Clark juga menaruh perhatian pada ide kesetaraan atau egalitarianisme. Salah satu alasan mengapa Nietzsche mengkritik ide kesetaraan di dalam masyarakat demokratis adalah karena ide tersebut memandulkan tiap orang untuk menghargai kesempurnaan dan kesuksesan individu. Dengan kata lain, demokrasi melanggengkan ide kesetaraan. Biarpun, pada praktiknya kesetaraan itu sendiri belum pernah dicapai dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, komentator Nietzsche seperti Lawrence J. Hatab menegaskan kalau Nietzsche menolak gagasan bahwa demokrasi dapat menghasilkan kesetaraan (hlm. 176). Melalui aforisme *Gay Science* (GS) §18, Hatab menyuarakan

kembali diagnosis Nietzsche: “[K]ita terbiasa dengan *doktrin* kesetaraan, tetapi bukan dengan kesetaraan itu sendiri.”

Clark sendiri memang sependapat dengan Hatab bahwa Nietzsche mengkritik egalitarianisme. Namun, Clark menolak argumen Hatab dengan keras dan bahkan menganggapnya sebagai kesalahan fatal. Menurut Clark, persoalan Nietzsche dengan demokrasi bukan karena sistem tersebut menghancurkan apresiasi atas kesempurnaan dan kesuksesan. Tapi, lebih halus dari itu, Clark berpendapat bahwa demokrasi “merendahkan berbagai tolok ukur kita mengenai apa yang dikonstitusikan sebagai kesuksesan dan kesempurnaan, menjadikannya kasar, jelata, dan bahkan biadab (*barbaric*)” (hlm. 176).

Berdasarkan posisi-posisi tafsir itulah Clark mempertahankan bahwa Nietzsche—secara khusus dalam BGE—tidak mengusung institusi politik aristokratis tertentu ataupun menolak institusi demokratis. Namun, Nietzsche memperlihatkan komitmennya pada nilai-nilai aristokratis, yakni bahwa ada segelintir manusia tertentu yang memiliki nilai yang lebih tinggi (*higher value*) dibandingkan manusia pada umumnya (hlm 182). Dan nilai yang lebih tinggi tersebut tidak ditentukan berdasarkan asal kelas, ras, ataupun orientasi seksual. Tapi, orang-orang tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi karena mereka menyadari disposisi jiwa (*states of the soul*) mereka yang lebih tinggi dan yang sekaligus tidak dapat digapai oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, segelintir orang yang memiliki nilai lebih tinggi inilah yang dapat menentukan tujuan masyarakat sebagai suatu kebaikan tertinggi.

Dengan demikian, Clark menyimpulkan bahwa Nietzsche tidak sedang mengusung ketidaksetaraan politis di dalam BGE. Sebaliknya, Clark menunjukkan bahwa Nietzsche jelas-jelas mengusung suatu pengakuan akan ketidaksetaraan personal. Pasalnya, melalui pengakuan tersebut terbukalah kemungkinan akan “suatu peringkat tertinggi bagi manusia-manusia yang lebih spiritual” (hlm. 183).

Melalui dua tema tersebut—etika dan politik—Clark meng-hadirkan tafsiran tak lazim atas teks-teks Nietzsche. Meski demikian, tafsiran ter-

sebut bukanlah hal yang baru di kalangan akademisi Nietzschean yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir ini. Misalnya, tafsir yang memprioritaskan nilai-nilai aristokratis ketimbang institusi/tatanan politik aristokratis sekurang-kurangnya telah muncul sejak tahun 1990-an seperti yang dipaparkan oleh Ted Sadler dalam buku *Nietzsche: Truth and Redemption* (London: Athlone Press, 1995). Dalam buku tersebut, Sadler mengistilahkannya dengan “roh aristokratis” yang dibedakan dengan dua jenis roh lainnya: roh kelas jelata dan roh kelas menengah.

Selain itu, format NPE sebagai kumpulan esai-esai Clark lebih menekankan kekayaan sudut pandang ataupun kritik atas tafsiran umum mengenai etika dan politik Nietzschean ketimbang kedalaman argumentasi akan suatu isu tertentu. Penekanan tersebut tampak ketika Clark membahas pandangan-pandangan para komentator Nietzsche kontemporer (khususnya Anglo-Amerika), seperti: Lawrence J. Hatab, Bernard Williams, Allan Bloom, Keith Ansell-Pearson, Julian Young, dan Brian Leiter. Meski demikian, NPE menawarkan posisi tafsir yang cukup kokoh karena Clark menunjukkan secara langsung teks-teks Nietzsche yang menjadi sumber rujukannya. Tentu saja iklim tersebut baik guna membuka polemik dan variasi pemahaman yang lebih teruji seiring waktu. (*Yulius Tandyanto, Mahasiswa, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.*)